

BUKU MANUAL PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI PENELITIAN HUKUM DAN HAM



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU UTARA**

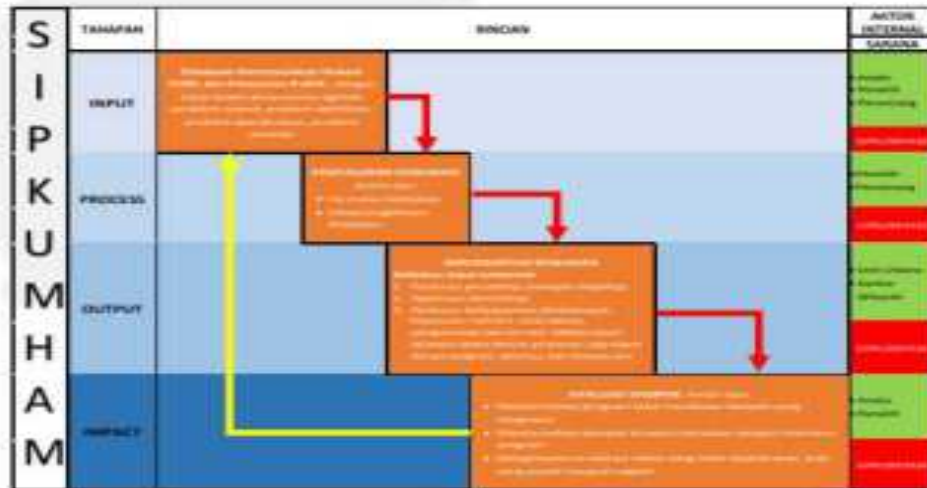
TERNATE, JULI 2021

1. Deskripsi Sistem

Balibbang Hukum dan HAM melakukan inovasi revolusi digital dengan merubah mekanisme sistem SIPKUMHAM. SIPKUMHAM bertransformasi menjadi sistem dengan menerapkan *artificial intelligence* dan *crawling data* sehingga mampu menginventarisir, mengidentifikasi serta mengklasifikasi permasalahan hukum, hak asasi manusia, serta pelayanan publik dari media *online* dan media sosial secara otomatis. Kini SIPKUMHAM telah dapat menjangar ± 3000 permasalahan terkait layanan publik, hukum dan HAM seluruh Indonesia dalam kurun waktu satu bulan atau 35.000 data selama satu tahun. Database ini memiliki potensi besar dan sangat berguna dalam memetakan permasalahan hukum, hak asasi manusia, dan pelayanan publik sehingga dapat mendukung pembuatan kebijakan, peningkatan kualitas penelitian, dan menyediakan data dan informasi peta permasalahan hukum, hak asasi manusia serta pelayanan publik di lingkungan Kemenkumham.



Pengembangan SIPKUMHAM akan menjadi tools yang dapat menghasilkan data dan informasi yang relevan, valid, dan representatif, guna mendukung proses pembentukan kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Alur kerja pemanfaatan SIPKUMHAM dalam pembentukan kebijakan publik ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



2. Database

Database SIPKUMHAM akan memuat hal-hal berikut :

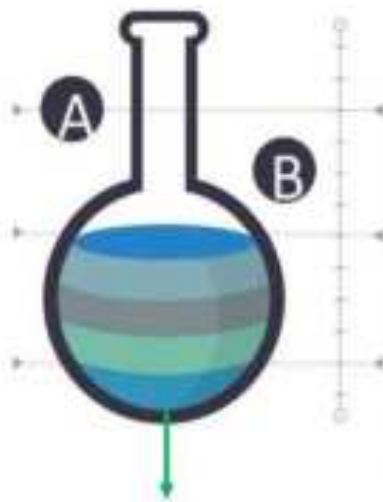
- Data dan informasi tentang permasalahan hukum/HAM yang mencakup: (i) peristiwa (waktu, lokasi, uraian/ringkasan, pelaku, korban), (ii) klasifikasi permasalahan (hukum mencakup pidana, perdata, TUN, agama dan lainnya, ham mencakup sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya).(iii) penanganan (tanggal, status, kronologi, peraturan terkait, pihak terkait), dan (iv) sumber (media, tanggal, link)
- Data dan informasi tentang pelayanan publik yang mencakup: (i) peristiwa (waktu, lokasi, uraian/ringkasan, unit), (ii) klasifikasi layanan (unit eselon I mencakup Imigrasi, Pemasarakatan, AHU, KI, lainnya), (iii) kategori permasalahan (waktu pelayanan, ketersediaan sarana, info terkait prosedur, lainnya, (iv) penanganan (tanggal, status, kronologi), (v) sumber (media, tanggal, Link)
- Informasi tentang analisis permasalahan hukum dan HAM serta pelayanan publik yang dilakukan secara daring (*online*) dan seketika (*real time*) dalam bentuk angka, peta, grafik, chart, dan model visualisasi lainnya.

Peristiwa Hukum/HAM	Waktu	Lokasi	Uraian/Ringkasan Permasalahan	Pelaku	Korban		
Klasifikasi Permasalahan	Hukum	Pidana	Perdata	TUN	Agama	Lainnya	
	HAM	Sipil	Politik	Ekonomi	Sosial	Budaya	Lainnya
	Jenis Hukum/HAM						
Penanganan	Tanggal	Status	Kronologi	Peraturan Terkait	Pihak Terkait		
Sumber	Sumber Berita	Tanggal	Link				

Peristiwa Pelayanan	Waktu	Lokasi	Uraian Permasalahan	Unit		
Klasifikasi Layanan	Unit Es. I	Imigrasi	Pemasarakatan	AHU	KI	Lainnya
	Layanan	Paspor ...	Perwakilan Konsuler ...	Perhubungan, IT ...	Hak Cipta, Merek, Paten, ...	Lainnya
Kategori permasalahan	Waktu pelayanan	Ketersediaan Sarana	Info tlg. Prosedur	Lainnya		
Penanganan	Tanggal	Status	Kronologi			
Sumber	Sumber Berita	Tanggal	Link			

3. Dashboard

Dashboard SIPKUMHAM akan memuat hal-hal berikut :



Pelayanan Publik

SEBARAN DATA NASIONAL – PROVINSI – KAB/KOTA –
UNIT UTAMA – SATKER – KATEGORI LAYANAN –
INDIKATOR – SUMBER – MEDIA – SENTIMEN – LIST
PEMBERITAAN ...

Permasalahan Hukum

SEBARAN DATA NASIONAL – PROVINSI – KAB/KOTA –
KATEGORI PERMASALAHAN – KATEGORI ISU – PELAKU –
KORBAN – TINDAKAN PENYELESAIAN – SUMBER – MEDIA
– LIST PEMBERITAAN

Permasalahan HAM

SEBARAN DATA NASIONAL – PROVINSI – KAB/KOTA –
KATEGORI PERMASALAHAN – KATEGORI ISU – PELAKU –
KORBAN – TINDAKAN PENYELESAIAN – SUMBER –
MEDIA – LIST PEMBERITAAN

Activate Win



Data dan informasi akan **menunjukkan pola, tren, dan isu-isu aktual** permasalahan hukum dan HAM, serta pelayanan publik yang ada di masyarakat, dan menjadi informasi untuk mendukung pembuatan kebijakan serta peningkatan kualitas penelitian

Dalam jangka pendek, pembuat kebijakan mampu memberikan respon permasalahan yang muncul dengan cepat dan tepat. Pada tahapan berikutnya, para pihak mampu menyusun rencana aksi dan program sebagai kebijakan yang sesuai dengan masalah-masalah yang dihadapi

4. Fitur SIPKUMHAM

- 1) Memiliki kemampuan untuk melakukan analisa dan menampilkan visualisasi data terkait **Permasalahan Hukum dan HAM**, meliputi :
 - Menyediakan data permasalahan hukum dan HAM pada GIS Map sesuai tempat permasalahan (kejadian)
 - Klasifikasi Permasalahan Hukum seluruh Indonesia
 - Klasifikasi Permasalahan Hukum per-Provinsi
 - Klasifikasi Permasalahan Hukum per-Kategori
 - Klasifikasi Permasalahan Hukum per-Timeline
 - Klasifikasi Permasalahan Hukum berupa komparasi (Locus dan Tempus)
 - Klasifikasi Permasalahan HAM seluruh Indonesia
 - Klasifikasi Permasalahan HAM per-Provinsi
 - Klasifikasi Permasalahan HAM per-Kategori
 - Klasifikasi Permasalahan HAM per-Timeline
 - Klasifikasi Permasalahan HAM berupa komparasi (Locus dan Tempus)
 - Statistik jenis permasalahan hukum dan HAM per wilayah

- 2) Memiliki kemampuan untuk melakukan analisa dan menampilkan visualisasi data terkait **Layanan Publik**, meliputi:
 - Menyediakan data layanan publik pada GIS Map sesuai tempat permasalahan (kejadian)
 - Klasifikasi layanan publik seluruh Indonesia
 - Klasifikasi layanan publik per-Provinsi
 - Klasifikasi layanan publik per-Kategori
 - Klasifikasi layanan publik per-Timeline
 - Klasifikasi layanan publik per-Unit Satker
 - Klasifikasi layanan publik berupa komparasi (Locus dan Tempus)
 - Statistik klasifikasi layanan publik per wilayah

- 3) Memiliki kemampuan untuk melakukan analisa dan menampilkan visualisasi terkait data media online dan media sosial hasil *crawling* (data visual disajikan dengan data filter) :
 - Sumber media online
 - Sumber media sosial
 - Trending topik menggunakan *word clouds* atau *chart*
 - Memiliki kemampuan melakukan *sentiment analysis*, sehingga dapat ditentukan apakah sentimen terhadap sebuah topik tertentu adalah negatif, netral atau positif.

5. Akses SIPKUMHAM

Tata cara mengakses sistem SIPKUMHAM sebagai berikut :



- 1) Masukkan alamat pada browser internet, ketik url <http://sipkumham1.balltbangham.go.id/>
- 2) Masuk ke menu login di bagian kanan atas dari tampilan pada dashboard di browser internet



- 3) Melakukan login dengan memasukkan email dan password (akun diberikan secara terpisah dari juklak)



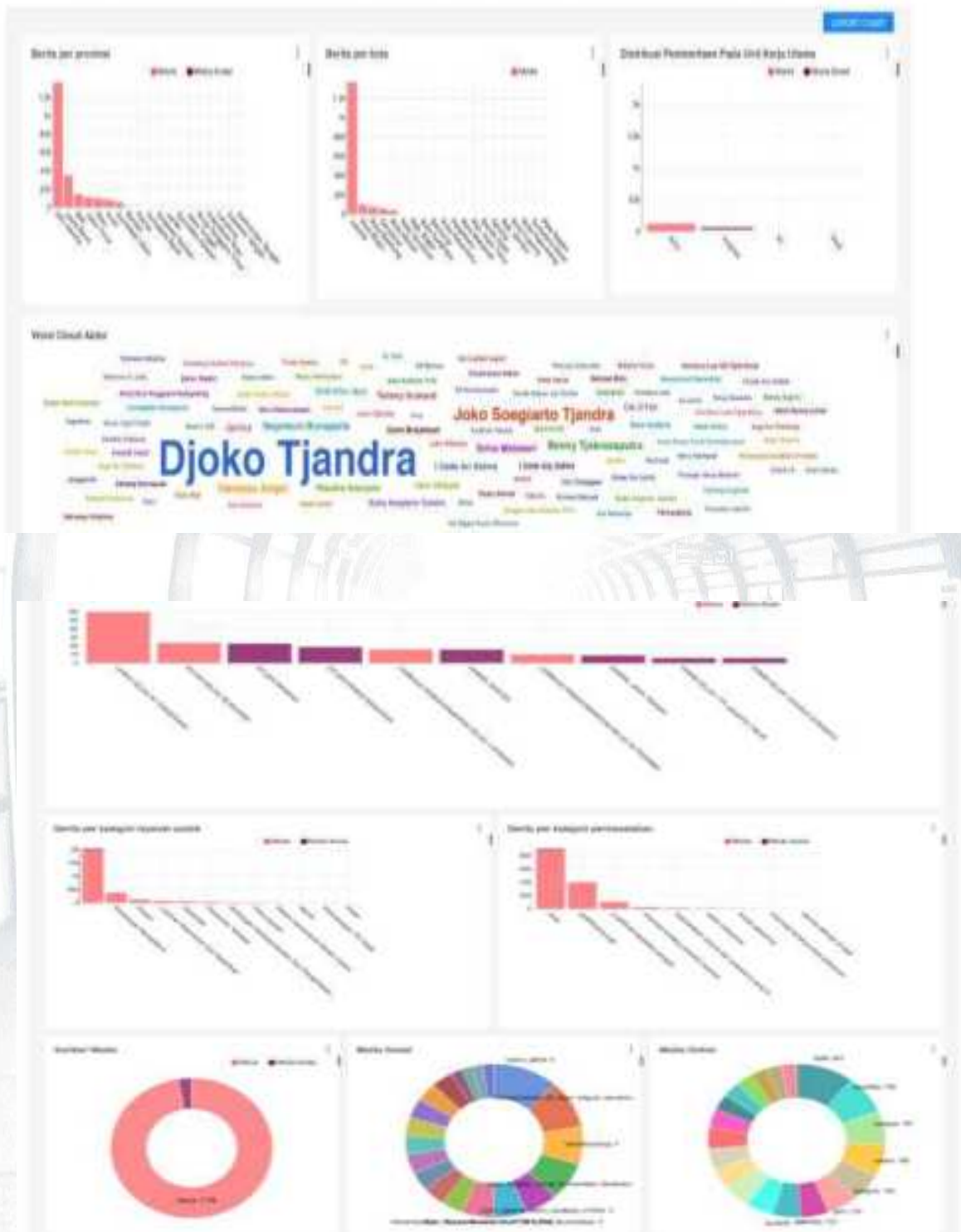
- 4) Memilih menu "Pelayanan Publik" (atau permasalahan hukum/ Permasalahan HAM) pada dashboard utama. Pada tampilan menu Pelayanan Publik/ Permasalahan Hukum/ Permasalahan HAM, dapat memilih menu analisis untuk tampilan dashboard yang mudah dilihat

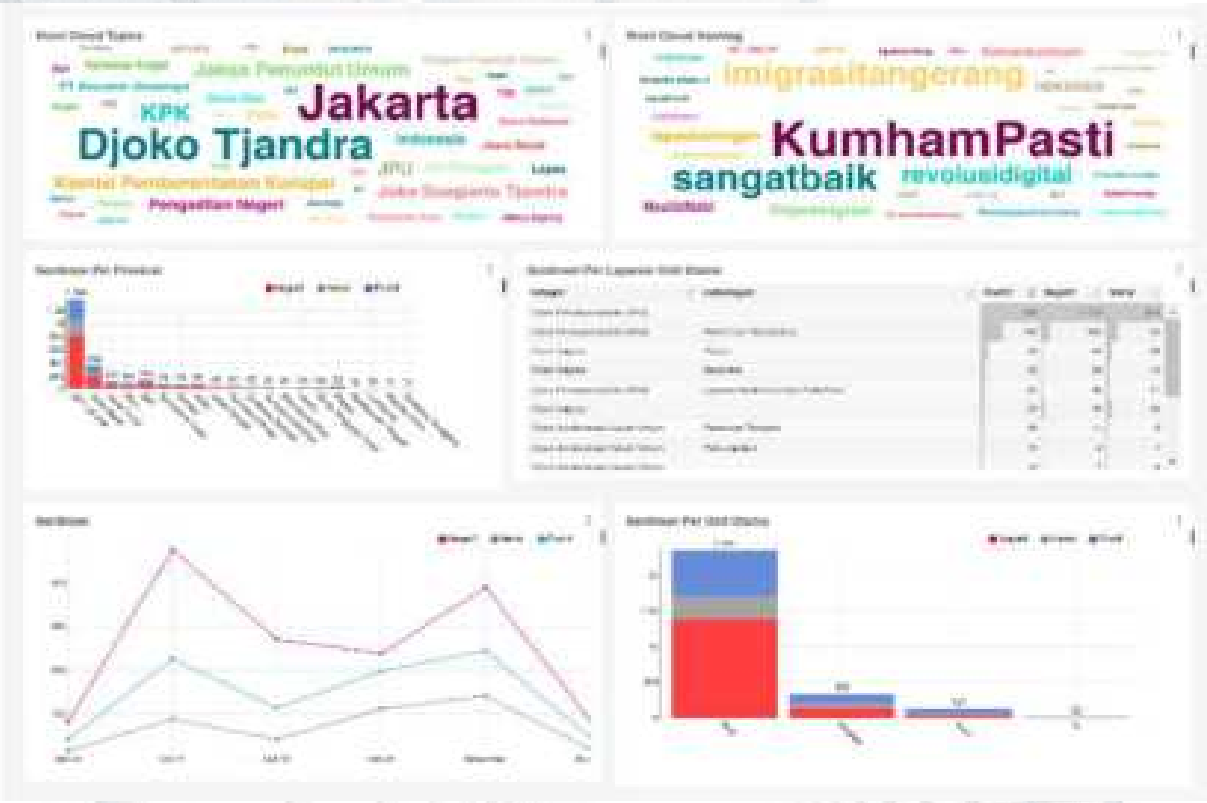


- 5) Selanjutnya dapat memilih filter antara lain Provinsi, Kabupaten/Kota, Unit Utama dan filter lainnya sesuai kebutuhan, dilanjutkan dengan memilih tombol Apply.

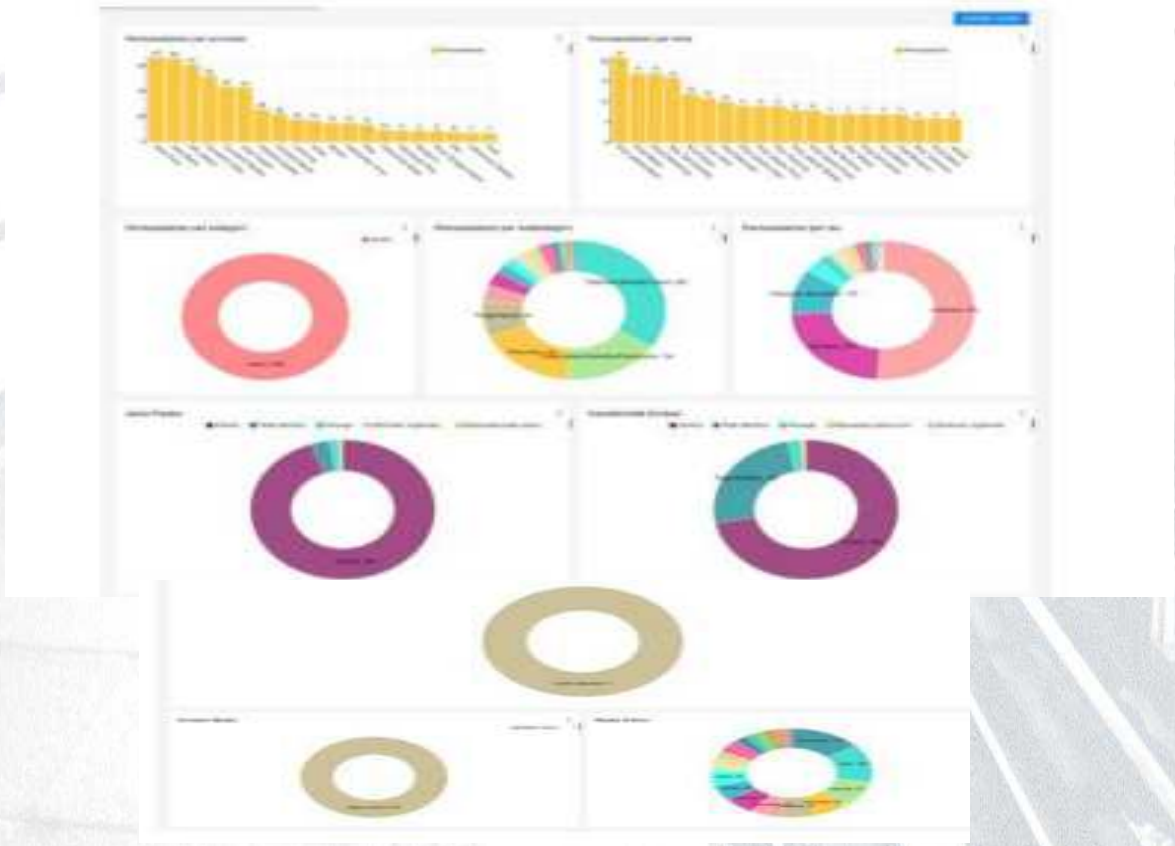
The screenshot shows a filter form with various fields. The 'Provinsi' field is highlighted in green. The 'Kabupaten/Kota' field is also highlighted in green. The 'Unit Utama' field is highlighted in green. The 'Apply' button is highlighted in blue. A red arrow points to the 'Apply' button.

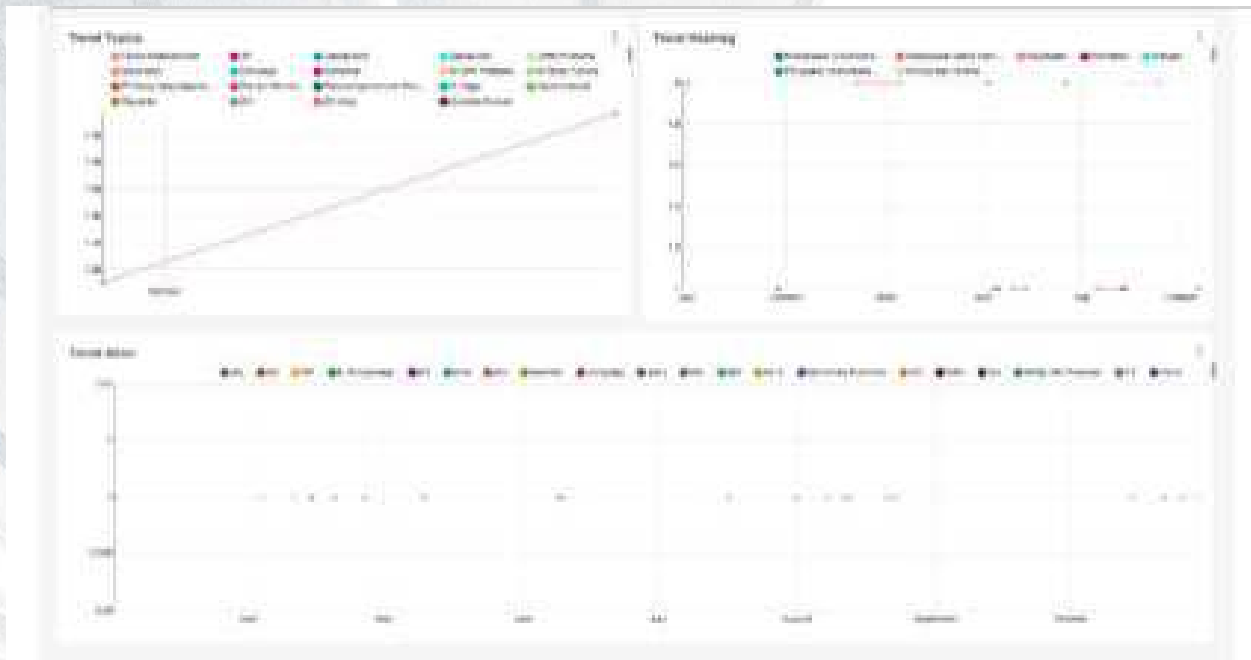
6) Tampilan Dashboard Pelayanan Publik sebagai berikut :





7) Tampilan Dashboard Permasalahan Hukum sebagai berikut:





List Engkuan

Daftar 10 - 20 artikel

id	judul	kategori	status	tanggal	aksi
20211001	Artikel	Artikel	Engkuan	2021-10-01	Engkuan
20211002	Artikel	Artikel	Engkuan	2021-10-02	Engkuan
20211003	Artikel	Artikel	Engkuan	2021-10-03	Engkuan
20211004	Artikel	Artikel	Engkuan	2021-10-04	Engkuan
20211005	Artikel	Artikel	Engkuan	2021-10-05	Engkuan
20211006	Artikel	Artikel	Engkuan	2021-10-06	Engkuan
20211007	Artikel	Artikel	Engkuan	2021-10-07	Engkuan
20211008	Artikel	Artikel	Engkuan	2021-10-08	Engkuan
20211009	Artikel	Artikel	Engkuan	2021-10-09	Engkuan
20211010	Artikel	Artikel	Engkuan	2021-10-10	Engkuan

Daftar 1 to 10 of 200 articles

List Pembinaan (Ber Laporan)

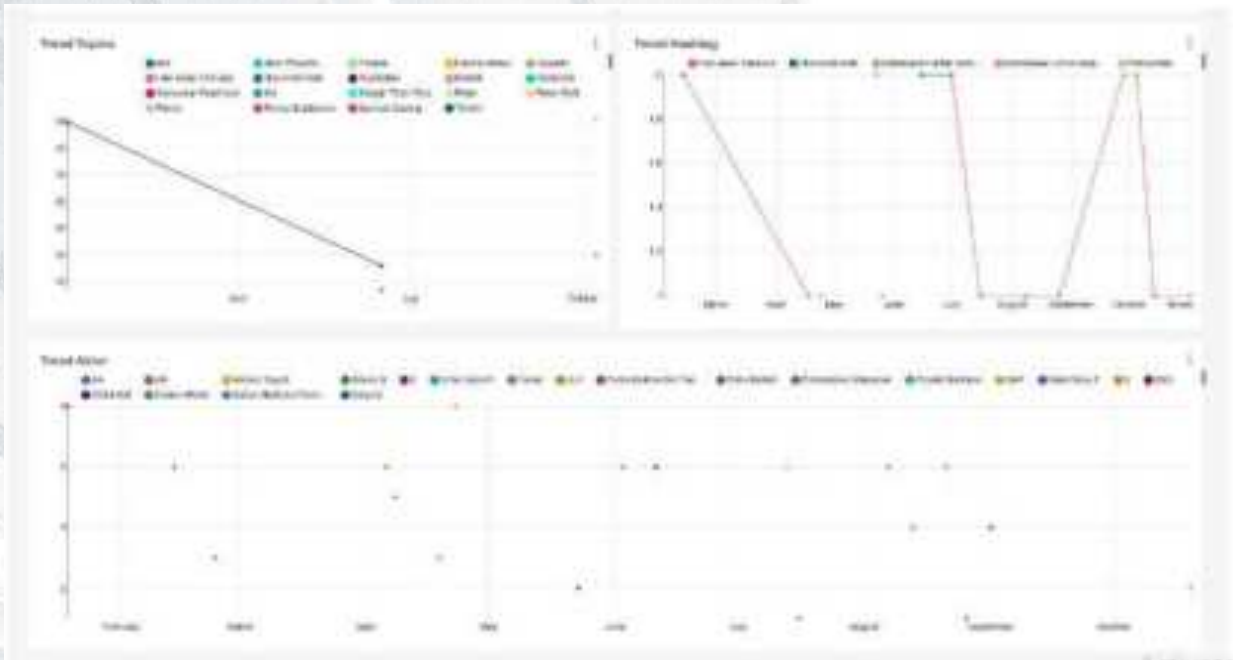
Daftar 10 - 20 artikel

id	judul	kategori	status	tanggal	aksi
20211001	Artikel	Artikel	Engkuan	2021-10-01	Engkuan
20211002	Artikel	Artikel	Engkuan	2021-10-02	Engkuan
20211003	Artikel	Artikel	Engkuan	2021-10-03	Engkuan
20211004	Artikel	Artikel	Engkuan	2021-10-04	Engkuan
20211005	Artikel	Artikel	Engkuan	2021-10-05	Engkuan
20211006	Artikel	Artikel	Engkuan	2021-10-06	Engkuan
20211007	Artikel	Artikel	Engkuan	2021-10-07	Engkuan
20211008	Artikel	Artikel	Engkuan	2021-10-08	Engkuan
20211009	Artikel	Artikel	Engkuan	2021-10-09	Engkuan
20211010	Artikel	Artikel	Engkuan	2021-10-10	Engkuan

Daftar 1 to 10 of 200 articles

8) Tampilan Dashboard Permasalahan HAM sebagai berikut:





List Kegiatan

Daftar Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Waktu	Status
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

List Perencanaan dan Laporan

Daftar Perencanaan dan Laporan

No	Uraian Perencanaan dan Laporan	Waktu	Status
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010



MENAMBAH PERMASALAHAN HUKUM/HAM PADA APLIKASI SIPKUMHAM

Fitur menambah permasalahan hukum/HAM ini digunakan apabila ada permasalahan aktual di wilayah yang tidak/kurang diliput oleh media (yang telah terdata pada sistem) dengan mencantumkan sumber yang jelas dan telah dipublikasi oleh media (cetak/online), yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan analisis kebijakan, dengan tahapan :

- 1) Login pada Aplikasi sebagaimana pada tahapan login di atas. (halaman 11)
- 2) Klik salah satu Menu berikut :

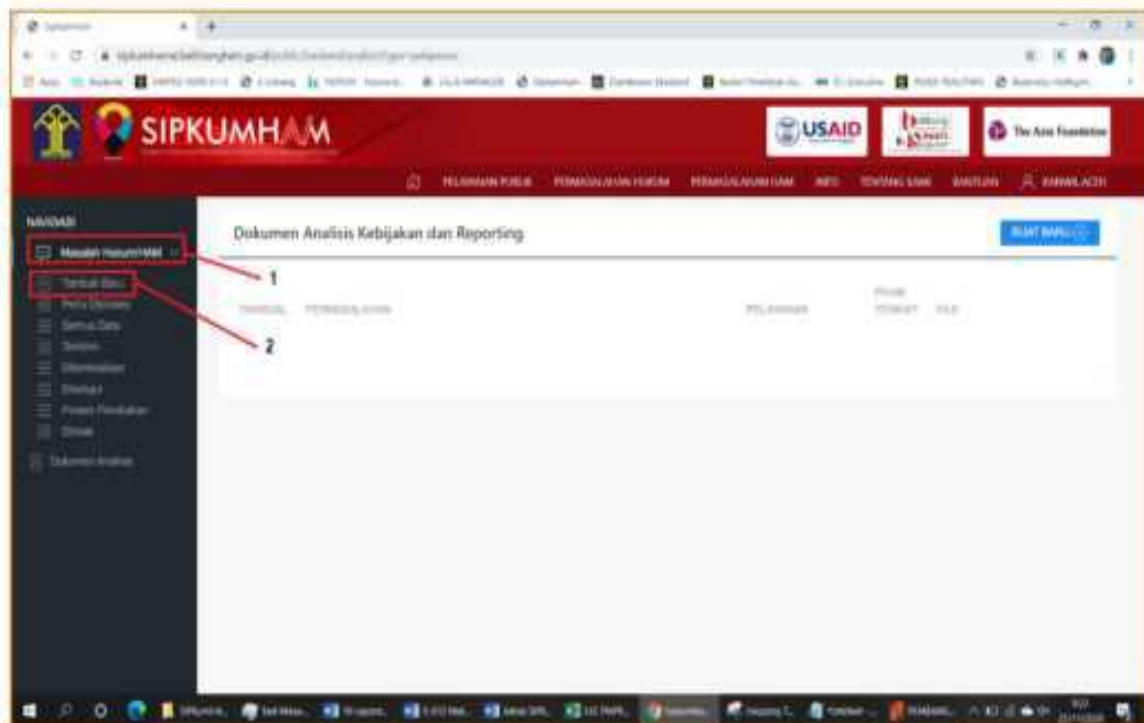
PERMASALAHAN HUKUM PERMASALAHAN HAM

Sesuai dengan jenis permasalahan yang akan ditambahkan apakah terkait **Permasalahan Hukum** atau **Permasalahan HAM**

- 3) Klik sub Menu "Laporan Permasalahan"



- 4) Akan diarahkan ke halaman baru, seperti di bawah ini kemudian klik "Masalah Hukum/HAM" pada panel **NAVIGASI** kemudian klik "Tambah Baru"



5) Lengkapi data pada semua kolom berikut :

The screenshot shows the SIPKUMHAM web application interface. The header includes the SIPKUMHAM logo, USAID logo, and the text 'Tingkatkan Kualitas Pelayanan'. The main content area is titled 'Permasalahan Hukum dan HAM' and contains several input fields for data entry:

- Kejadian: 2020-04-11
- Waktu: 10:00
- Kejadian Peristiwa: [Empty text field]
- Kejadian dan Peristiwa: [Empty text field]
- Dasar Hukum Peristiwa: [Empty text field]
- Detail: [Empty text field]
- Kejadian (Detail): [Empty text field]
- Kejadian: [Empty text field]
- Kejadian (Detail): [Empty text field]
- Kejadian: [Empty text field]
- Kejadian (Detail): [Empty text field]
- Kejadian: [Empty text field]
- Kejadian (Detail): [Empty text field]
- Kejadian: [Empty text field]
- Kejadian (Detail): [Empty text field]

At the bottom, there is a 'Histori Dokumen' section with a table containing columns for 'No', 'Jenis', 'Status', and 'Tanggal'.

- Permasalahan Hukum dan HAM

Tanggal kejadian: 2020-04-13

Judul permasalahan: Masalah 123

Kategori Permasalahan: Hukum HAM

Kategori Permasalahan: Hukum HAM

Sub Kategori Permasalahan: Permasalahan Hukum HAM

Lokasi: Pilih lokasi

Kategori Pelaku: Pilih kategori pelaku

Kategori Korban: Pilih kategori korban

Tindakan/Keputusan: Pilih tindakan penyelesaian

Media: Isikan media yang telah mempublikasi bila tidak ada kosongkan saja

Detail permasalahan: Tuliskan detail / kronologi permasalahan dan mencantumkan url berita apabila dari media online
 contoh:
<https://media.co.id/berita/qmhoo1380/p-residen-ri-serahkan-104-sertifikat-tanah->

Untuk pelaku dan korban silahkan klik button  kemudian isikan nama pelaku / korban kemudian klik "OK"

Input Field

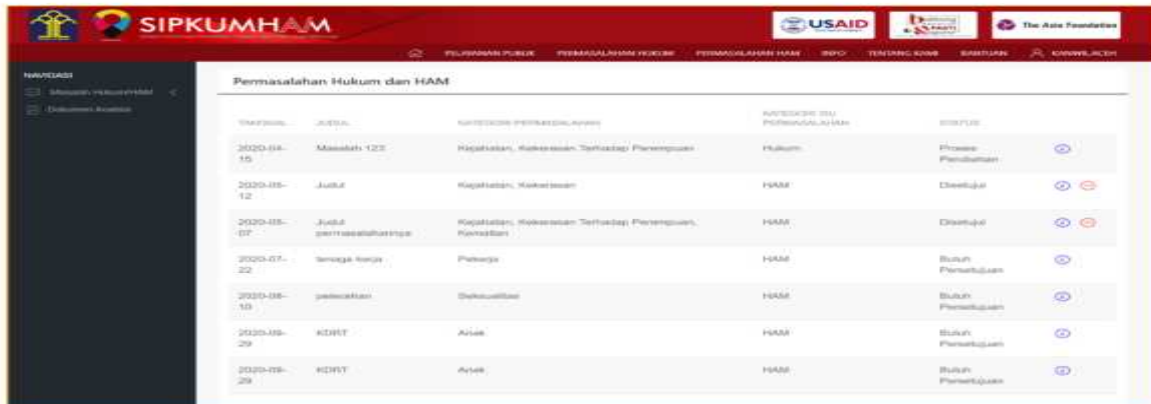
Jika semua data sudah terisi semua kemudian klik "Kirim" untuk mengirim permasalahan yang telah di input, anda akan di minta mengisi komentar namun boleh di kosongkan.

Komentar (opsional)

Input Field

Kirim

- 6) Data akan tersimpan sesuai dengan keterangan yang telah di input, Data yang baru saja di input pada keterangan akan berisi "Butuh Persetujuan"

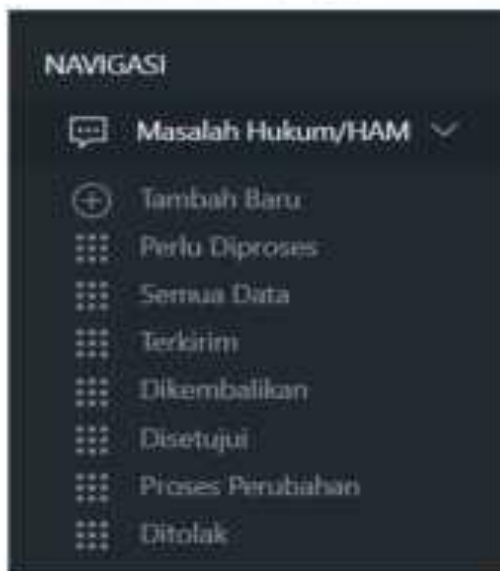


The screenshot shows the SIPKUMHAM web application interface. The header includes logos for USAID, The Asia Foundation, and the Ministry of Law and Human Rights. The main content area is titled "Permasalahan Hukum dan HAM" and contains a table with the following data:

TANGGAL	JUDUL	KATEGORI PERMASALAHAN	KATEGORI ISU PERMASALAHAN	STATUS
2020-04-10	Masalah 123	Kegagalan, Kekerasan Terhadap Perempuan	Hukum	Proses Perubahan
2020-05-12	Judul	Kegagalan, Kekerasan	HAM	Disetujui
2020-05-07	Judul permasalahan	Kegagalan, Kekerasan Terhadap Perempuan, Kekerasan	HAM	Disetujui
2020-07-22	Isuaga teraja	Perjanja	HAM	Butuh Persetujuan
2020-08-10	perwakilan	Dokumentasi	HAM	Butuh Persetujuan
2020-09-29	KDRT	Anak	HAM	Butuh Persetujuan
2020-09-29	KDRT	Anak	HAM	Butuh Persetujuan

Pada panel **NAVIGASI** dapat terlihat pengelompokan Data berdasarkan progress

Pada panel **NAVIGASI** dapat terlihat pengelompokan Data berdasarkan progress





MENGINPUT LAPORAN ANALISIS PADA APLIKASI SIPKUMHAM

- 1) Login pada Aplikasi sebagaimana pada tahapan login di atas.
- 2) Klik salah satu Menu berikut :

PELAYANAN PUBLIK PERMASALAHAN HUKUM PERMASALAHAN HAM

Sesuai dengan jenis Laporan kegiatan Analisis Kebijakan dan Reporting yang di buat apakah terkait **Pelayanan Publik, Permasalahan Hukum atau Permasalahan HAM**

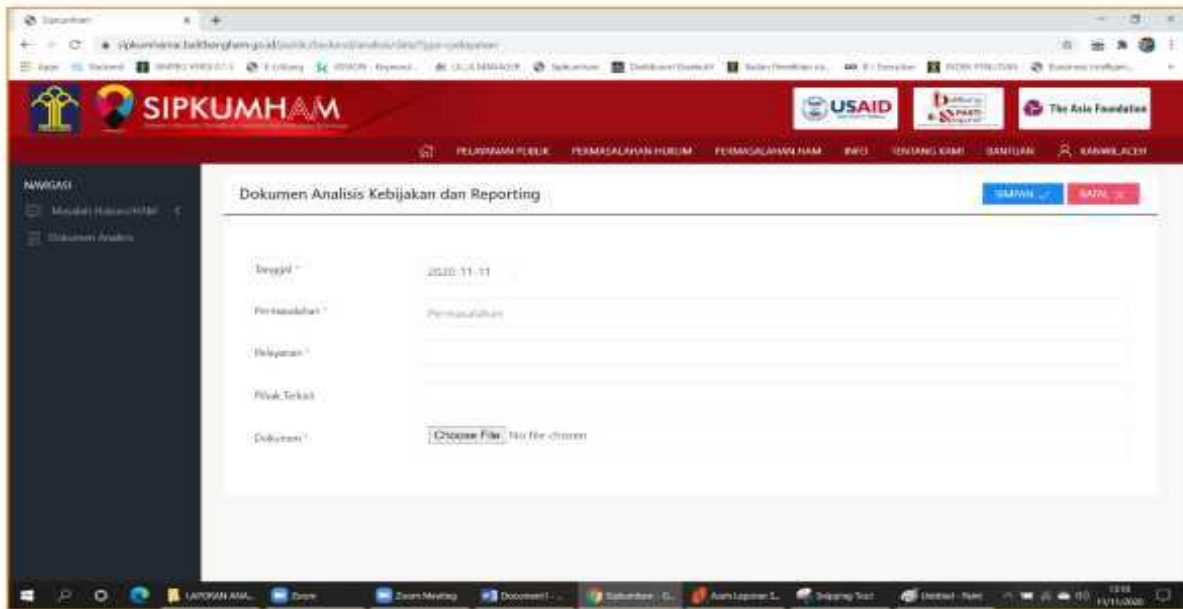
- 3) Klik sub Menu "Dokumen Hasil Analisis"



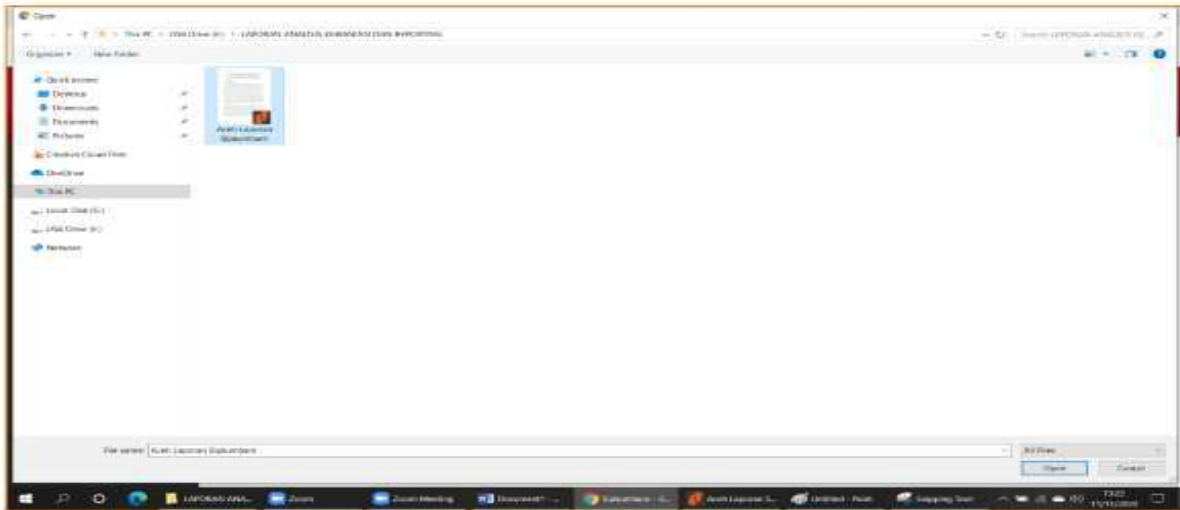
- 4) Akan diarahkan ke halaman baru, seperti dibawah ini kemudian klik "Buat Baru"



5) Lengkapi data pada semua kolom berikut :



Pilih dokumen Laporan Analisis Kebijakan yang akan di upload.



Kemudian klik **"Simpan"**

- 6) Dokumen akan tersimpan sesuai dengan keterangan yang telah di input, dokumen yang telah tersimpan tidak dapat diubah/ dihapus.



PENGEMBANGAN SIPKUMHAM



Bagaimana **mengetahui, mengumpulkan dan menganalisis data tentang masalah-masalah hukum dan hak asasi manusia, serta pelayanan publik** yang kemudian dapat digunakan untuk pembuatan kebijakan ?

TUJUAN

1. mendukung pembuatan kebijakan di bidang hukum dan HAM (*evidence-based policy making*),
2. mendukung peningkatan kualitas penelitian di bidang hukum dan HAM dengan adanya data yang memadai; dan
3. menyediakan informasi tentang permasalahan hukum dan HAM serta pelayanan publik kepada seluruh unit utama di lingkungan Kemenkumham dan masyarakat.

80 Media Online (dewan pers)

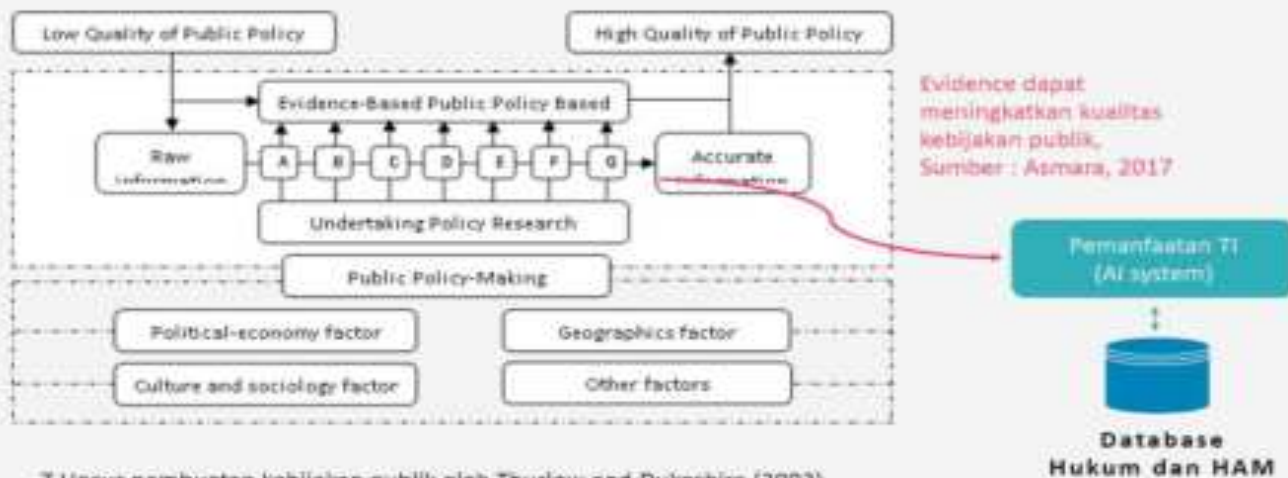
± 600 twitter Satker

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Data yang tersajikan :

- **update** : klasifikasi data dan sentiment analysis.
- **relevan** yang berarti harus berkaitan dengan fungsi-fungsi unit utama
- **representatif** artinya mampu merepresentasikan kondisi yang nyata di masyarakat
- **valid**, yang berarti bahwa sumber data dapat dipercaya dan dipastikan kebenarannya

PEMBUATAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI



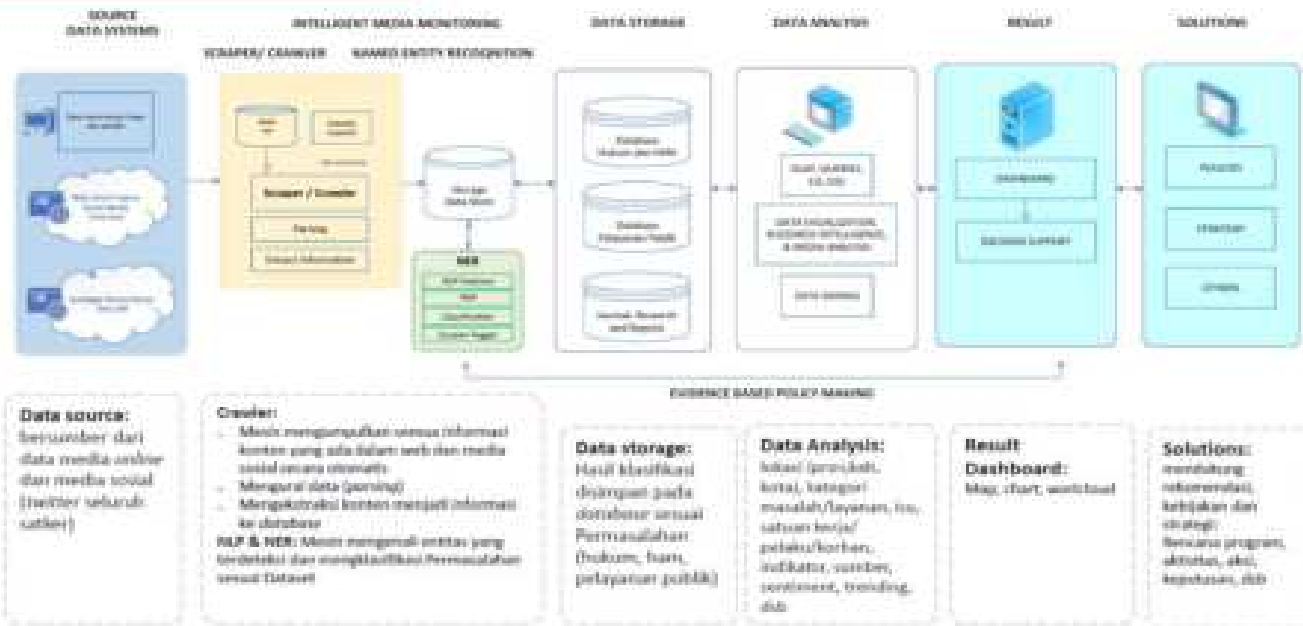
7 Unsur pembuatan kebijakan publik oleh Thurlow and Dukeshire (2002)

A : **Case Studies**, B : **Field Experiments**, C : Cost Benefit Analysis

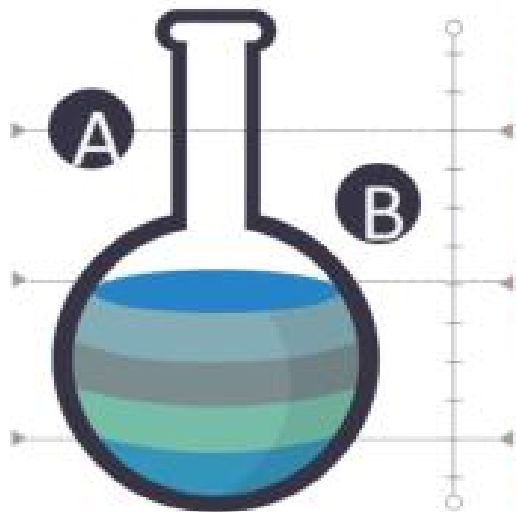
D : Secondary Analysis, E : Qualitative Methods, F: Focused Review of Existing Research

G : Surveys

PROSES BISNIS SIPKUMHAM



DASHBOARD OVERVIEW



Pelayanan Publik

SEBARAN DATA NASIONAL – PROVINSI – KAB/KOTA – UNIT UTAMA – SATKER – KATEGORI LAYANAN – INDIKATOR – SUMBER – MEDIA – SENTIMEN – LIST PEMBERITAAN ...

Permasalahan Hukum

SEBARAN DATA NASIONAL – PROVINSI – KAB/KOTA – KATEGORI PERMASALAHAN – KATEGORI ISU – PELAKU – KORBAN – TINDAKAN PENYELESAIAN – SUMBER – MEDIA – LIST PEMBERITAAN

Permasalahan HAM

SEBARAN DATA NASIONAL – PROVINSI – KAB/KOTA – KATEGORI PERMASALAHAN – KATEGORI ISU – PELAKU – KORBAN – TINDAKAN PENYELESAIAN – SUMBER – MEDIA – LIST PEMBERITAAN

DATABASE SIPKUMHAM



Data dan informasi akan **menunjukkan pola, tren, dan isu-isu aktual** permasalahan hukum dan HAM, serta pelayanan publik yang ada di masyarakat, dan menjadi informasi untuk mendukung pembuatan kebijakan serta peningkatan kualitas penelitian

Dalam jangka pendek, pembuat kebijakan mampu memberikan respon permasalahan yang muncul dengan cepat dan tepat. Pada tahapan berikutnya, para pihak mampu menyusun rencana aksi dan program sebagai kebijakan yang sesuai dengan masalah-masalah yang dihadapi

Pemanfaatan SIPKUMHAM dalam Pembentukan Kebijakan



Data dan Informasi Permasalahan pelayanan publik

Peristiwa Pelayanan	Waktu	Lokasi	Urutan Permasalahan	Unit			
Klasifikasi Layanan	Unit Es. I	Imigrasi	Pemasyarakatan	AHU	BI	Lainnya	
	Layanan	Paspor ,...	Pembinaan Narapidana ,...	Perkumpulan, PT ..	Hak Cipta, Merek, Paten, ...	Lainnya	
Kategori permasalahan	Waktu pelayanan	Ketersediaan Sarana	Info ttg Prosedur	Lainnya			
Penanganan	Tanggal	Status	Kronologi				
Sumber	Sumber Berita	Tanggal	Link				

Data dan Informasi Permasalahan Hukum dan HAM

Peristiwa Hukum/HAM	Waktu	Lokasi	Urutan/ Ringkasan Permasalahan	Pelaku	Korban		
Klasifikasi Permasalahan	Hukum	Pidana	Fordata	TUM	Agama	Lainnya	
	HAM	Sipi	Politik	Ekonomi	Sosial	Budaya	Lainnya
	Isu- Hukum/HAM						
Penanganan	Tanggal	Status	Kronologi	Peraturan Terkait	Pinak Terkait		
Sumber	Sumber Berita	Tanggal	Link				

